KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN WARISAN ANAK DIBAWAH PERWALIAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Rehulina

(Dosen Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantara Medan)

ABSTRAK

Perwalian (*voogdij*) adalah: Pengawasan terhadap anak yang dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Berdasarkan pengertian diatas bahwa yang dapat ditempatkan bahwa perwalian adalah anak yang belum dewasa (di bawah umur) dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Perwalian diatur dalam KUHPerduta Bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian diatur dalam pasal 330-432, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 50-54, Kompilasi Hukum Islam pasal 1 angka (1), pasal 107-112, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 30-36. keempat, kelima dan keenam dalam bab ini". Wali mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi harta anak yang berada dibawah perwaliannya, baik dalam hal keselamatan anak tersebut dari pengaruh lingkungan, maupun terhadap harta benda anak yang ditinggal oleh orang tuannya. Harta anak yang ditinggal oleh orang tuanya setelah anak berpindah dibawah perwalian seseorang maka yang bertindak sebagai wali harus membuat daftar harta benda anak setelah dijadikan sebagai wali anak tersebut. Seperti yang terdapat dalam pasal 51 angka 4 yang menerangkan bahwa "wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Pengambilan dan pengelolaan harta anak dibawah perwalian dilakukan untuk kepentingan si anak tersebut. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua/wali.

Dalam hal pengambilan dan pengelolaan harta anak dibawah perwalian harus menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Warisan anak, Kitab undang-undang Hukum Perdata

1. PENDAHULUAN

Anak-anak yang belum dewasa tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut. Disinilah pentingnya

kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, kekuasaan orang tua meliputi 2 hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri si anak. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi:
 - a. Pengurusan harta benda si anak.
 - b. Menikmati hasil dari harta benda si anak. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.

Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab negara.¹

Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul suatu perwalian, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Metode

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif adalah metode ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan yang erat kaitannya dengan pokok bahasan. Jurnal yang bersifat kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

2.2 Data

Sumber Data dalam penelitian adalah Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder dari penelitian ini merupakan peraturan perundangan, buku-buku, dokumen, makalah, skripsi, dan lain-lain yang berkaitan dengan perwalian anak.

3. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a) Pengertian Anak

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara pasti tentang definisi anak, tetapi berdasarkan Pasal 330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak).
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

b). Anak Dibawah Umur

Menurut Pasal 330 KUHPerdata belum dewasa adalah: "mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Menurut Pasal tersebut, bahwa semua orang yang belum genap 21 tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dimata hukum, yang artinya belum bisa bersikap tindak dan berperilaku yang sesuai dimata hukum.

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47 ayat (1) berbunyi: "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kuasanya".

c). Kedudukan Anak

Menurut KUHPerdata putusanya perkawinan membawa akibat pada kedudukan anak, kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian. Menurut pasal 229 KUHPerdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak maka menurut pasal 230 KUHPerdata hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus dibayar pihak lain untuk membiayai anak dibawah umur.

2. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

Perwalian diatur dalam KUHPerdata Bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian diatur dalam pasal 330-432, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 50-54, Kompilasi Hukum Islam pasal 1 angka (1), pasal 107-112, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 30-36.

a. Pengertian Perwalian

Menurut R. Sarjono, "Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anakyang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua".

Dalam KUHPerdata pasal 330 ayat (3) perwalian adalah: "mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bahadian ketiga, keempat, kelima dan keenam dalam bab ini".

Dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam hal Hakim mengangkat seorang wali maka perwalian boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan, lembaga amal atau yayasan yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya disebutkan bahwa perhimpunan, lembaga atau yayasan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang diberikan kepada wali. Berdasar hal tersebut, maka perwalian yang terjadi pada panti asuhan sebagai sebuah yayasan di bidang sosial sesuai.

Unsur-unsur pokok dalam suatu perwalian adalah:

1. Adanya pengawasan, pemeliharaan dan pengurusan.
2. Adanya anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
3. Adanya harta kekayaan.
4. Adanya wali.
5. Adanya kewajiban hukum.

b. Asas Perwalian

Asas-asas yang pada umumnya berlaku dalam perwalian menurut R Soetojo Prawirohamidjoyo adalah:

1. Asas tak dapat dibagi-bagi

Pada setiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Asas ini mempunyai perkecualian dalam 2hal yaitu:

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia menikah lagi suaminya menjadi wali serta, hal ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan di luar Indonesia, maka dapat diangkat wali lain yang khusus mengurus harta tersebut selain wali yang ada. Hal ini diatur dalam Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga dari anak harus dimintai persetujuan dari perwalian tersebut, dalam hal tidak ada keluarga maka persetujuan itu tidak diperlukan.

Dalam pasal 379 KUHPerdara menyebutkan 5 (lima) golongan orang yang tidak diperbolehkan menjadi seorang wali, yaitu:

1. Mereka yang mengalami sakit ingatan.
2. Mereka yang belum dewasa.
3. Mereka yang berada dibawah pengampuan.
4. Mereka yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
5. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku, dan agen balai harta peninggalan kecuali terhadap anak-anak tiri mereka atau anak mereka sendiri.

Berdasarkan Pasal 50 angka (1) Undang-Undang nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian. Syarat-syaratnya tersebut adalah:

- a. Anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun);
- b. Anak-anak yang belum kawin;
- c. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
- d. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;
- e. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wali adalah

:

1. Wali harus seorang yang sehat pikirannya.
Orang yang sakit ingatannya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, oleh karena itu orang yang tidak sehat pikirannya adalah di bawah pengampuan, dan segala tindakannya dalam hukum diwakili oleh si pengampu, maka keadaanya sama seperti yang masih di bawah umur.
2. Wali harus orang yang dewasa.
Seorang dikatakan sudah dewasa jikalau ia telah berumur 21 tahun atau jika ia belum mencapai umur 21 tahun tetapi ia sudah kawin. Hanya orang yang sudah dewasa boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sedangkan orang yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan bertindak sendirian tetapi harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya.
3. Wali itu tidak berada di bawah pengampuan
Seseorang yang sudah dewasa dapat ditaruh di bawah pengampuan, misalnya karena ia menghambur-hamburkan harta kekayaannya atau karena ia kurang cerdas pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya. Orang yang berada di bawah pengampuan adalah yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, sebab mereka harus diwakili dalam melakukan tindakan-tindakannya, sehingga dengan sendirinya ia tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi untuk mengurus diri orang lain.

c. Mulai berlakunya perwalian

Menyangkut dengan mulai berlaku suatu perwalian Martiman Prodjohamidjojo mengatakan sutau perwalian itu berlaku :

1. Sejak perwalian itu diangkat oleh hakim dan bila pengangkatan itu dilakukan namun dalam tidak kehadiran si wali maka saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya maka berlangsung lah perwalian tersebut;
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua sianak pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya, memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu.
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali, baik oleh hakim Maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu.
4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.
5. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya.
6. Jika ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua, sebelum orang tua tersebut meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi. (diatur dalam pasal 50, 52 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Mulainya sebuah perwalian diatur dalam pasal 331 huruf (a) KUHPerdara, disebutkan bahwa:

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
2. Jika seorang willi diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
3. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

d. Berakhirnya Perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu;

1. Dalam hubungan dengan keadaan anak;
Dalam hubungan dengan keadaan anak Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena:
 - a. Si anak yang di bawah perwalian telah dewasa (meerderjaring);
 - b. si anak (minderjaring) meninggal dunia;
 - c. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya (ouderlijkemach);
 - d. pengesahan seorang anak luar kawin

2. Dalam hubungan dengan tugas wali.

Dalam hubungan dengan tugas wali Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena:

- a. wali meninggal dunia;
- b. dibebaskan atau dipecat dari perwalian (*ontzetting of ontheffing*; dan
- c. ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 BW), sedangkan syarat utama untuk dipecat (*ontzet*) sebagai wali, ialah disandarkan pada kepentingan *minderjarige* itu sendiri.

Alasan lain yang dapat mengakhiri perwalian diatur dalam pasal 382 KUPerdata menyatakan bahwa:

1. jika wali berkelakuan buruk.
2. Jika dalam melakukan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.
3. Jika wali dalam keadaan pailit.
4. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
5. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Jika wali apa memberitahukan terjadinya perwalian kepada balai harta peninggalan.
7. Jika wali tidak memberikan pertanggung jawaban kepada balai harta peninggalan.

Untuk anak yang berada dibawah kekuasaan yayasan maka alasan lain yang dapat mengakhiri perwalian Jika wali apa memberitahukan terjadinya perwalian kepada balai harta peninggalan. Dalam pasal 356 KUHPerdata menyatakan bahwa: "apabila sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitra pengadilan yang menugaskan perwalian harus memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan".

Selain itu dalam pasal 377 KUHPerdata seorang wali atau badan hukum dapat meminta pembebasan perwalian sebagai wali dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mereka yang dalam melakukan jawatan negara berada diluar indonesia.
2. Anggota tentara laut dan darat dalam menunaikan tugasnya.
3. Mereka yang melakukan jawatan umum yang terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar keresidenan.
4. Mereka yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun
5. Mereka yang terganggu oleh penyakit yang berat.
6. Mereka yang disertai tugas memangku satu atau dua perwalian sedangkan mereka sendiri tidak mempunyai anak.
7. Mereka yang pada hari pengangkatan mempunyai 5 (lima) atau lebih anak yang sah.
8. Seorang perempuan yang dalam keadaan tidak bersuami telah menerima perwalian dapat meminta pembebasan sebagai wali apabila perempuan tersebut menikah.
9. Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud padahal mereka dalam daerah hukum tempat perwalian.

Pengambilan Dan Pengelolaan Harta Waris Anak Dibawah Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wali diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah terdekat dengan si anak itu atau bapaknya yang karena sesuatu hal telah bercerai atau anak yang orang tuanya sudah meninggal dimana wali anak tersebut dapat diangkat dari saudara-saudaranya yang dianggap cakap untuk itu. Hakim juga dapat menetapkan seseorang atau perkumpulan sebagai wali. Penetapan atau *beschikking*, yaitu: Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi kewenangannya dalam memeriksa perkara yang diadakan di luar putusan pengadilan, misalnya:

- a. perintah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- b. perintah untuk penambahan alat bukti.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pengambilan dan pengelolaan harta anak dibawah perwalian dilakukan untuk kepentingan si anak tersebut. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua/wali.

Dalam hal pengambilan dan pengelolaan harta anak dibawah perwalian harus menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.

Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.
- b. Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selalu menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah perwaliannya itu.
- c. Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia.maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya akan terselamatkan.
- d. Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang orang yang mengadakan *wala' al mu'awallah* perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.
- e. Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin.dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari hari.

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri.

Wewenang Wali

1. Orang Perseorangan

Pada pasal 1332 b ayat (1) KUHPerdata menyatakan: "perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya".

Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332 b ayat (2) KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Selanjutnya pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan: "Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula."

Dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kuasa dari hakim.

2. Wewenang Badan Hukum Menjadi Wali

Biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali adalah menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.

Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa: "dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai Perwalian. Pasal 50 menyatakan pada ayat:

- Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dalam Pasal 51 menyatakan:

- Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

- d. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- e. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ditentukan cara penunjukan wali yaitu sebagai berikut:

1. wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi;
2. wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pada akhir pelaksanaan tugasnya, wali harus membuat dan meninggalkan laporan atau perhitungan pengelolaan aset (finansial) di pengadilan tingkat kecamatan untuk anak yang berada di bawah perwaliannya, untuk ahli waris anak tersebut jika anak yang berada di bawah perwalian tersebut telah meninggal, atau untuk penerus wali. Hal ini diatur dalam pasal 373 KUHPerdara.

Perhitungan ini dilakukan dalam hal:

1. perwalian yang sama sekali dihentikan, yaitu kepada *minderjarige* atau kepada ahli warisnya;
2. perwalian yang dihentikan karena diri (person) wali, yaitu kepada yang menggantinya; dan
3. *minderjaring* yang sesudah berada di bawah perwalian, kembali lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, yaitu kepada bapak atau ibu *minderjarige* itu (Pasal 409 KUHPerdara).

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pengambilan Dan Pengelolaan Harta Waris Anak Dibawah Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Kewajiban Wali

Setiap wali mempunyai kewajiban terhadap anak-anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewajiban wali terdiri atas:

- a. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Hart Peninggalan. Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
- b. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).
- c. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal 335 KUH Perdata).
- d. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata).
- e. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan innatura dengan izin Weeskamer. (pasal 389 KUH Perdata).
- f. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)
- g. Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Tugas Wali Berdasarkan Pasal 383 KUH Perdata tugas wali adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan atas diri pupil (orang yang memerlukan perwalian). Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa sesuai dengan kekayaan si yang belum dewasa itu sendiri.
2. Mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perdata.
3. Mengelola harta benda pupilnya sebagai bapak rumah tangga yang baik (Pasal 385 KUH Perdata).

Kewajiban wali berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun

1974:

1. mengurus anak dan harta bendanya secara baik dengan menghormati agama dan kepercayaan si anak (Pasal 51 ayat 3).
2. membuat daftar harta kekayaan dan mencatatnya (Pasal 51 ayat 4)
3. bertanggung jawab tentang harta benda si anak serta kerugian yang timbul karena kelalaian dan kesalahan dan kesalahannya (Pasal 51 ayat 5).
4. Memberikan ganti rugi terhadap harta benda si anak karena kesalahan dan kelalaian (Pasal 54).

Dalam Pasal 393-398 KUH Perdata perbuatan yang berwenang dilakukan oleh wali dengan mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukannya kecuali ada izin dari hakim, adalah:

1. Meminjam uang sekalipun untuk kepentingan minderjarige, tidak boleh juga memindahkan atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang andelnya tanpa mendapatkan kuasa dari pengadilan;

2. Membeli barang-barang tak bergerak dari seseorang minderjarige. Pembelian yang demikian itu hanya diperkenankan kalau dilakukan atas dasar pelelangan umum dan baru berlaku sesudah ada izin dari pengadilan;
3. Menyewa ataupun menyewakan barang-barang minderjarige yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya keluarga sedarah atau periparan minderjarige;
4. Menerima warisan untuk seseorang minderjarige (perbuatan ini hanya diperbolehkan sesudah diadakan pencabutan.
5. Menolak warisan barang untuk seseorang minderjarige (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim);
6. Menerima hibah bagi seorang minderjarige (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim). Ketentuan ini sebenarnya diadakan terhadap hibah-hibah dengan suatu beban (schenkingen onder last);
7. Memajukan gugatan bagi minderjarige;
8. Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan minderjarige;
9. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan (*dading atau kompromi*) bagi *minderjarige*. Dalam perbuatan ini diperlukan pula persetujuan pengadilan.

Wali pengawas memiliki kewajiban antara lain:

1. Mengadakan pengawasan terus terhadap wali;
2. Menyatakan pendapatnya terhadap berbagai tindakan yang harus dilakukan bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut hadir dalam tindakantindakan tertentu;
3. Bertindak jika ada kepentingan yang bertentangan antara wali dengan minderjarige;
4. Bertindak jika wali tidak hadir atau perwalian itu terluang. Wali pengawas di Indonesia dijalankan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan (*Weskamer*).

b. Hak seorang wali

Tugas sebagai seorang wali sangatlah berat dengan tanggung jawab yang besar dan risiko yang harus dihadapinya. Tugas seorang wali dapat mengambil sebahagian dari harta kekayaan si anak dengan ketentuan sesuai pasal 41KUHPdata sebagai berikut:

1. Tiga perseratus dari semua pendapatan
2. Dua perseratus dari segala pengeluaran
3. Satu setengah perseratus dari jumlah modal yang diterima.

c. Hak-Hak Anak

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraanya. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan

berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

2. Hak atas pelayanan. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
 3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
 4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
 5. Hak mendapatkan pertolongan pertama. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
 6. Hak memperoleh asuhan. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan yang lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
 7. Hak memperoleh bantuan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
 8. Hak diberi pelayanan dan asuhan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
 9. Hak memperoleh pelayanan khusus. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
 10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan. Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial (Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
- Hak anak berdasarkan Undang-Undang noor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 18, yaitu:
1. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 2. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

3. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
11. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
13. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
14. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
15. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
16. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

SIMPULAN

1. Penunjukan perwalian terhadap anak kepada pihak lain melalui penetapan pengadilan dengan menunjuk seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal anak belum mendapat

penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud harus mendapat penetapan pengadilan.

2. Perwalian merupakan suatu lembaga yang berupaya untuk mengurus kepentingan anak yang belum dewasa, baik kepentingan pribadinya maupun kepentingan harta bendanya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku wali wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan dan mengurus harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya, termasuk warisannya. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada dibawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, 2008, **Pelaksanaan Hukum Warsi Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lubis, Mukhlis, 2011, **Ilmu Pembagian Waris**, Medan: Pesantren Al-Manar.
- Satrio, J., 1992, **Hukum Waris**, Bandung, Penerbit Alumni.
- Suparman, H. Eman, 2005, **Hukum Waris Indonesia**, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 2002, **Hukum Adat Indonesia**, Jakarta, PT Raja Graindo Persada.
- Irma Setyowati Soenitro, 1990, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta, Bumi Aksara.
- Smma, Muhammad Amin, 1990, **Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam**, Jkarta: PT Raja Grafindo.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Yudhi Marza Harca, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Tsunami Di Aceh, Yudhi Marza Harca, www.Google.Com, 25 September 2015.
- www.legalakses.com, 25 September 2015
- Frisca Putri Prihandini, *Pelaksanaan perwalian anak Oleh panti asuhan widya kasih boyolali Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia*, www.google.com tanggal 25 september 2015.
- Septy Veronita, *Hak Perwalian Anak Dibawah Umur Yang Beralih Kepada Neneknya*, www.google.com 25 September 2015.
- Mansari, ZA, *Perwalian, Pengsuhan anak dan Peran Orang Tua Dalam Perlindungan Anak*, blogspot.co.id, 19 Oktober 2015.